

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

Timbulnya ide atau gagasan untuk mendirikan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berawal dari keluarnya Undang-undang nomor 13 tahun 1962 yang memuat Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Beberapa pertimbangan diperlukan adanya Bank Pembangunan Daerah menurut undang-undang tersebut adalah :

- a. Bahwa untuk mempercepat terlaksananya usaha-usaha pembangunan yang merata di seluruh Indonesia perlu adanya pergerakan modal dan potensi di daerah-daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.
- b. Bahwa pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daerah sebaiknya dijalankan sedemikian rupa sehingga modal pembelanjaannya dapat diperoleh dari hasil proyek-proyek pembangunan tersebut.
- c. Bahwa untuk mempertinggi daya usaha di daerah dalam membangun dapat dilakukan antara lain dengan jalan memberikan kemungkinan mendirikan bank-bank di daerah yang menjalankan usaha-usaha bank umum dan bertugas mengerahkan modal dan potensi di daerah-daerah dengan mengikutsertakan pihak swasta nasional progresif untuk mengusahakan pembiayaan proyek-proyek daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1962 ini, maka pada akhir tahun 1962, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yang pada saat itu

dijabat oleh Y.C. Oevang Oeray telah memanggil beberapa orang staf Kantor Gubernur, yaitu :

1. M. Yanis (Sekretaris Daerah) sebagai koordinator
2. A.M. Johan (Kepala Bagian Perekonomian) sebagai anggota
3. M.A. Rahman (Kepala Bagian Keuangan) sebagai anggota
4. Paimin (Kepala Bagian Kepegawaian) sebagai anggota
5. Drs. S. Brotosanjoyo (Kepala Bagian Pengawas Keuangan) sebagai anggota
6. Hasnol Kabri (Kepala Bagian Pengawas Keuangan) sebagai anggota
7. Abdul Muin (Kepala Bagian Umum/Perlengkapan) sebagai anggota

Para pejabat ini merupakan satu tim yang dikoordinir langsung oleh Sekretaris Daerah dengan pembagian tugas tim sesuai fungsi jabatan masing-masing. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat telah memerintahkan untuk menjajaki dan mempersiapkan pendirian Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat selambat-lambatnya dalam awal tahun 1963 sudah dapat terealisasi.

Berdasarkan jadwal waktu yang telah ditentukan, maka tim mulai bekerja sesuai dengan program kerja yang telah dirumuskan. Tim ini berhasil merumuskan dan menjalankan program kerja yakni :

1. Pengajuan Kalimantan Peraturan Daerah tentang Pendirian Bank Pembangunan daerah Kalimantan Barat kepada DPRD Tingkat I Kalimantan Barat berhasil mendapat penetapan / persetujuan menjadi Peraturan Daerah No. 1 tahun 1963 pada tanggal 19 Juni 1963.

2. Selanjutnya berdasarkan peraturan daerah tersebut, telah diajukan permohonan izin usaha kepada YM Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia dan telah diberi izin usaha dengan surat Keputusan Nomor 44/63/Kep/MUBS/G tanggal 28 Nopember 1963.
3. Demikian pula mengenai penyisihan uang dari kas daerah sebesar Rp 20.000.000,00 sebagai pembelian saham oleh Pemerintahan Daerah telah disisihkan termasuk memberikan pinjaman sebuah ruangan berukuran 4m×6m di Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat jalan Sultan Syahrir Pontianak berikut 4 buah meja tulis, 1 buah meja ketik, 1 buah mesin ketik merek Royal, 1 buah mesin hitung ADOX, 1 buah steel cabinet dan 1 buah almari besi.
4. Sebanyak 200 saham prioritas sebesar @Rp5.000,00 telah dicetak. Sebanyak 100 lembar prioritas dan 2.000 lembar saham biasa telah dibeli oleh Pemda Tk.I Kalbar.
5. Kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 56/PD/1963 tanggal 31 Desember 1963 untuk pertama kalinya masing-masing diangkat sebagai Direksi adalah Drs. Nurdin, staf ahli pada Bagian Perekonomian Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalbar sebagai Direktur Utama dan Ny. S.U. Saleh Dono, staf Bank Bumi Daya cabang Jawa Barat di Bandung sebagai Direktur Bank Pembangunan daerah Kalimantan Barat ditugaskan untuk melengkapi staf.

Setelah program kerja yang menjadi syarat untuk terbentuknya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dipenuhi, maka pada tanggal 15 April 1964 diresmikanlah berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat menjadi BPD Kalbar atau dengan nama panggilan Bank Kalbar dalam suatu upacara peresmian oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yang bertempat di Gedung Font Nasional Pontianak. Tempat inilah yang menjadi Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama Pontianak.

Susunan manajemen Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat pada awal berdirinya adalah :

1. Badan Pengawas, terdiri dari :
 - J.C. Oevang Oeray : Ketua
 - Drs. Altar Sibero : Anggota
 - Djoko Spesillardjo : Anggota
 - Hugo Mungok : Anggota
 - Imam Sudjono : Anggota
2. Direksi, terdiri dari :
 - Drs. Nurdin Sidik : Direktur Utama
 - Ny. S.U. Saleh Dono : Direktur

Dasar hukum pendirian berupa izin usaha yang dimiliki Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur

Bank Indonesia dengan Surat Keputusan nomor 44/63/Kep/MUBS/G tanggal 28 Nopember 1963.

Seiring dengan pergantian tahun, landasan hukum (Peraturan Daerah No. 1 tahun 1963) yang mengatur tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat telah beberapa kali mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan perekonomian dan perkembangan daerah. Peraturan Daerah No. 1 tahun 1963 mengalami perubahan dan diganti dengan Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah No. 9 tahun 1975 yang antara lain merubah modal dasar dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan modal disetor dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 1982 yang disyahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584/41/191 tanggal 25 April 1983, yang antara lain merubah modal dasar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah No. 9 tahun 1990 yang antara lain merubah modal dasar dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Peraturan Daerah terakhir tentang BPD Kalbar sebelum berubah menjadi Perseroan Terbatas adalah Perda No. 10 tahun 1992 yang antara lain menetapkan perubahan modal dasar dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Guna meningkatkan kinerja Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, pada tahun 1996 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) melalui penandatanganan *Memorandum Of Understanding (MOU)* antara Gubernur dengan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. Yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 1996 di Jakarta. Untuk menindaklanjuti MOU tersebut, maka pada tanggal 9 Desember 1996 bertempat di kantor Bank Kalbar telah pula ditandatangani naskah Perjanjian Kerjasama antara BPD Kalbar dengan PT. BNI (Persero) Tbk. Yang meliputi bidang manajemen kredit, bidang sumber daya manusia, bidang oraganisasi, dan lain-lain yang dianggap perlu.

Seiring dengan perkembangan perbankan nasional yang sejak pertengahan tahun 1997 terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia dan khususnya bagi perekonomian Indonesia, menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan restrukturisasi perbankan guna menyelamatkan perbankan dari kehancuran antara lain melalui program Rekapitalisasi. Bank Kalbar merupakan salah satu bank yang ikut dalam program rekapitalisasi perbankan tersebut. Dan salah satu syarat keikutsertaan tersebut, maka Bank Kalbar harus sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan meningkatkan modal disetor agar dapat mencukupi ketentuan pemenuhan kebutuhan modal minimum (CAR) 8%. Atas dasar hal tersebut maka Bank Kalbar secara resmi berubah status badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,00 pada tanggal 23 April 1999, berdasarkan akte pendirian No. 81

tanggal 23 April 1999 oleh Notaris Widiansyah, SH di Pontianak dan telah mendapat persetujuan dari Meteri Kehakiman No. C-8229 HT.01.01 tanggal 5 Mei 1999 serta telah didaftarkan pada lembaran Negara No. 56 tanggal 13 Juli 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari PD menjadi PT, merupakan salah satu solusi agar Pemerintah Pusat dapat masuk menjadi pemegang saham dalam rangka membantu Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali agar dapat tercukupinya modal sesuai ketentuan kewajiban pemenuhan CAR 8% sehingga dapat mengikuti program rekapitalisasi perbankan yang dilaksanakan Pemerintah.

B. Visi dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

Menurut Amin Wijaya Tunggal (2002:23-24), visi berbeda dengan misi. Visi (*vision*) adalah “*what we believe we can be*”, sedangkan misi (*mission*) adalah “*what we believe we can do*”. Misi adalah maksud yang fundamental dan unik dari suatu perusahaan yang membedakannya dengan perusahaan lain dan menentukan bidang usaha perusahaan dalam arti produk dan pasarnya. Jadi misi menjelaskan “*area of emphasis*” dari produk, pasar, dan teknologi dari suatu perusahaan sedemikian rupa, sehingga mencerminkan nilai-nilai dan prioritas bagi pengambil keputusan strategik dari perusahaan itu. Amin Widjaya Tunggal (2001:28) juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan visi adalah rumusan dari salah satu atau gabungan dari tiga hal berikut ini :

1. apa yang ingin kita capai dimasa depan
2. apa yang ingin kita peroleh dimasa depan

3. kita ingin menjadi apa dimasa depan.

Sedangkan misi adalah rumusan tentang apa yang harus kita kerjakan atau harus kita tuntaskan.

Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat telah menyusun perencanaan bisnis dimana didalamnya ditetapkan visi dan misi perusahaan, yang merupakan pernyataan tujuan jangka panjang perusahaan, termasuk strategi yang akan digunakan untuk berkompetisi. Sebagai Bank yang berdiri untuk membantu mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam meningkatkan taraf hidup rakyat, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

1. VISI :

- 1) Berkembang secara wajar.
- 2) Menjadi perusahaan jasa perbankan yang berkinerja tinggi.
- 3) Memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

2. MISI :

- 1) Pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Pengelola dana Pemerintahan Daerah.
- 3) Pendorong pengembangan usaha kecil dan menengah.

Untuk dapat melaksanakan visi dan misi Bank Kalbar, maka semua jajaran mulai dai para pimpinan sampai kepada para karyawan yang paling rendah harus

bertekad untuk mengamalkan dan melaksanakan Budaya Kerja Bank Kalbar dalam sikap dan perilaku yang benar secara konsekuen dan bertanggung jawab.

Budaya kerja baru Bank Kalbar diharapkan dapat :

1. Menuntun dan membentuk sikap dan perilaku segenap pegawai Bank Kalbar agar mau dan mampu melaksanakan program kerja perusahaan demi pencapaian visi dan misi Bank Kalbar.
2. Membangkitkan komitmen terhadap pencapaian tujuan perusahaan yang lebih besar dari kepentingan pribadi.
3. Memberikan identitas bagi segenap pegawai Bank Kalbar.
4. Menopang kesatuan organisasi dengan memberikan standar-standar yang nyata, mengenai apa yang seharusnya dikatakan dan dikerjakan oleh para pegawai Bank Kalbar.
5. Adanya satu identitas yang khusus bagi Bank Kalbar, bila dibandingkan dengan bank-bank lain.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor SK /235/Dir Tahun 1999 tanggal 9 Desember 1999 tentang Reformulasi Budaya Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat telah ditetapkan antara lain :

1. Lima Bilah Budaya Kerja
 - a. Bank Kalbar adalah Bank Umum milik Daerah berstatus Perseroan Terbatas.

- b. Bank Kalbar selalu berupaya membina hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah dan mitra usahanya dengan menitik beratkan pada kegiatan usaha ekonomi kecil dan menengah.
- c. Bank Kalbar selalu berupaya meningkatkan kontribusinya dalam pendapatan asli daerah yang berorientasi pada pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. Bank Kalbar mengakui peran serta menghargai kepentingan setiap pegawai dan selalu mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kemauan kerjanya agar mampu mengelola bank secara profesional dengan prinsip kehati-hatian.
- e. Bank Kalbar selalu mengutamakan semangat keterbukaan dan semangat kebersamaan dengan prinsip dasar saling mengingatkan (asah), saling menghargai (asuh), dan saling membimbing (asih).

2. Sembilan Perilaku Pegawai Bank Kalbar

Agar Visi dan Misi Bank Kalbar dapat tercapai, maka setiap pegawai wajib melaksanakan Sembilan perilaku sebagai berikut :

- a. Setiap pegawai melaksanakan tugas dan kewajibannya secara tulus ikhlas dengan berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setiap pegawai harus selalu menjunjung tinggi dan mentaati Kode Etik Bankir Indonesia.
- c. Setiap pegawai selalu tanggap terhadap permintaan pasar dan berorientasi kepada program pembangunan Daerah maupun Nasional.

- d. Setiap pegawai harus selalu berupaya memberikan pelayanan yang unggul dengan pendekatan yang proaktif dan bersahabat kepada masyarakat, nasabah, dan mitra usaha.
- e. Setiap pegawai melaksanakan tugas dan kewajibannya atas dasar prioritas dan rencana dengan standar mutu yang tinggi dan realistis serta peduli terhadap permasalahan yang terjadi dilingkungan kerjanya.
- f. Setiap pegawai selalu melaksanakan pengawasan melekat dan menindaklanjuti hasilnya.
- g. Setiap pegawai harus selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta kemauan kerjanya.
- h. Setiap pegawai harus selalu melaksanakan komunikasi terbuka dan mengembangkan semangat kebersamaan dengan prinsip *dasa saling asah, saling asih, dan saling asuh*.
- i. Pegawai selalu menjadi teladan yang baik bagi lingkungannya.

C. Sasaran, Strategi dan Program Bank Kalbar

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berdasarkan *Corporate Plan* PT. Bank Kalbar tahun 2001-2005 (2001:70-82) menerapkan sasaran, strategi usaha dan program masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Tingkat Kesehatan

- Sasaran : Meningkatkan nilai kredit faktor CAMEL Bank Kalbar menjadi 90%.
- Strategi 1 : Memelihara dan mempertahankan kecukupan permodalan (CAR) agar dapat memenuhi ketentuan CAR minimal 12%, dengan mengendalikan pertumbuhan dan kualitas aktiva produktif serta meningkatkan profitabilitas.
- Strategi 2 : Meningkatkan kolektibilitas kredit lancar menjadi 95%.
- Strategi 3 : Mempertahankan rating manajemen.
- Strategi 4 : Berusaha mencapai ROA 1,25% dan ROE 18%.
- Strategi 5 : Memelihara dan mempertahankan ratio GWM 5% dan ratio kas 5%.

2. Penghimpunan Dana

- Sasaran 1 : Pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat berupa giro, deposito, dan tabungan sebesar 20 % pertahun.
- Strategi 1 : Meningkatkan usaha pemasaran dengan mencari nasabah potensial pada segmen pasar yang terabaikan atau belum terlayani secara optimal oleh pesaing, menawarkan produk dan jasa perbankan yang beragam serta memperbaiki mutu pelayanan.
- Strategi 2 : Memberikan benefit yang lebih besar kepada para nasabah baik berupa tingkat bunga yang bersaing, berbagai kemudahan (pelayanan pelanggan yang superior, ATM, dan sebagainya) dan merancang produk baru.
- Sasaran 2 : Menjaga image positif Bank Kalbar selaku bank milik dan kebanggaan daerah.
- Strategi : Lebih mendekatkan diri pada masyarakat Kalimantan Barat umumnya dan masyarakat industri khususnya.
- Sasaran 3 : Meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan.
- Strategi : Melatih dan mendidik, memotivasi karyawan pelayanan agar selalu dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan.

3. Penggunaan Dana

- Sasaran 1 : Meningkatkan pertumbuhan kredit 20% per tahun.
- Strategi : Memperluas basis debitur baik institusional maupun individual.
- Sasaran 2 : Penggunaan dana yang dihimpun secara optimal dengan memperhatikan faktor rentabilitas dan likuiditas.

Strategi : Meningkatkan pendapatan bunga yang maksimal dengan membatasi pananaman dana dengan suku bunga yang rendah dan menjaga likuiditas keseluruhan dan masing-masing cabang.

4. Permodalan

Sasaran : Penambahan Modal Disetor setiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan modal minimum.

Strategi : Pendekatan yang lebih intensif kepada pemilik Dati I dan Dati II.

5. Aktiva Produktif

Sasaran 1 : Perbaikan kolektibilitas kredit lancer menjadi minimal 95% dan meningkatkan hasil tagihan.

Strategi : Mengaktifkan supervise, pembinaan atau penyelamatan kredit dan mengintensifkan penagihan.

Sasaran 2 : Pertumbuhan Aktiva Produktif (kredit yang disalurkan dan penempatan dana) 15% per tahun dengan batas CAR minimal 12%.

Strategi 1 : Meningkatkan kemampuan tenaga perkreditan (kuantitas dan kualitas).

Strategi 2 : Penanaman dana dalam bentuk yang mudah dicairkan dengan suku bunga yang mendekati suku bunga penghimpunan dana.

6. Bidang Organisasi dan Manajemen (Logistik)

Sasaran 1 : Peningkatan kinerja masing-masing Unit Kerja.

Strategi : Menyempurnakan dan menyesuaikan organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Cabang Pembantu.

Sasaran 2 : Menyempurnakan dan menyesuaikan organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Cabang Pembantu.

Strategi : Meningkatkan pelaksanaan fungsi manajemen dengan baik berdasarkan kondisi yang dihadapi.

Sasaran 3 : Mengoptimalkan penggunaan petunjuk buku pedoman (pelaksanaan perusahaan) bagi pimpinan dan pegawai pelaksana dalam melaksanakan tugas.

Sasaran 4 : Perluasan jaringan pelayanan.

Strategi : Melaksanakan pembangunan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas serta pengadaan inventaris secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan dan batasan yang ditetapkan.

7. Sumber Daya Manusia

- Sasaran 1 : Peningkatan etos kerja pegawai.
- Strategi 1 : Perbaikan Program Kesejahteraan.
- Strategi 2 : Meningkatkan Disiplin Karyawan.
- Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Strategi 1 : Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan baik berjangka pendek maupun berjangka panjang (pendidikan S1 dan S2).
- Strategi 2 : Melaksanakan evaluasi kinerja pegawai.
- Sasaran 3 : Pengadaan dan penempatan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan.
- Strategi : Melakukan analisis beban kerja (*workload analysis*).

D. Struktur Organisasi

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka diperlukan struktur organisasi, karena dengan adanya struktur organisasi akan dapat dilihat kerangka pembagian tugas dari masing-masing bagian serta keseluruhan dari fungsi-fungsinya yang saling berhubungan satu sama lainnya. Selain dari itu struktur organisasi juga dapat menunjukkan koordinasi dari tugas-tugas serta fungsi dalam pencapaian tujuan. Dengan adanya struktur organisasi diharapkan seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lancar dan efisien, memungkinkan dilaksanakannya pendelegasian wewenang dan dapat berlangsungnya komunikasi yang lancar antara atasan dengan bawahan atau antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Struktur organisasi PT Bank Kalbar dapat ditunjukkan pada daftar lampiran.

Susunan manajemen Bank Kalbar terdiri dari pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) dan dibantu oleh pejabat eksekutif (Kepala Biro dan Pemimpin Cabang).

Pengurus Bank Kalbar terdiri dari:

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas:

- 1) Menentukan garis besar kebijaksanaan Bank Kalbar
- 2) Menjalankan fungsi pengawasan

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali.

Susunan Dewan Komisaris Bank Kalbar per 31-12-2002:

Komisaris Utama : Drs.H. Murdjani Abdullah

Komisaris : Drs.H. Syakirman

Komisaris : Drs.H. Sjahrial Hadi

Komisaris : Drs.H.A.R. Mokodompit

b. Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah pimpinan bank sehari-hari yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan Direktur-Direktur. Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali.

Susunan Direksi Bank Kalbar per 31-12-2002:

Direktur Utama : H. Djamaluddin Malik, SE.MM

Direktur Umum : Drs.H. Mawardi

Direktur Kepatuhan : Drs. Jamal attamimi, MM

Direktur Pemasaran : Drs. H.M Hasyim

Koordinasi Biro-Biro dengan Dewan Direksi dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Biro Pengkajian Keuangan dan Teknologi dan Satuan Pengawasan Intern di bawah koordinasi Direktur Utama.
- b. Biro Kredit, Biro Penyelamatan Kredit dan Biro Dana berada di bawah koordinasi Direktur Pemasaran
- c. Biro Perencanaan, Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Sekretariat dan Umum di bawah koordinasi Direktur Umum.

Uraian tugas Biro-Biro secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kepala Biro Pengkajian Keuangan dan Teknologi

Kepala Biro Pengkajian Keuangan dan Teknologi mempunyai fungsi pokok yaitu:

- a. Menghimpun, mengelola, menyajikan dan melaporkan data, baik yang menyangkut transaksi perbankan dan data lainnya kepada pihak manajemen/direksi.
- b. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data semua transaksi perbankan di kantor pusat untuk kepentingan komputerasi data.
- c. Menyusun neraca dan perhitungan rugi/laba untuk disajikan kepada pihak yang berkepentingan.

- d. Mengadakan analisa terhadap perkembangan posisi keuangan Bank
- e. Mengkoordinir kegiatan komputerisasi kantor pusat dan unit-unit operasional.

2. Kepala Satuan Pengawasan Intern

Kepala Satuan Pengawasan Intern mempunyai fungsi pokok:

- a. Mengoptimalkan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan system dan prosedur yang berlaku melalui kegiatan kepedulian dan pemeriksaan intern terhadap unit-unit organisasi.
- b. Mengevaluasi daya guna dan hasil guna serta kehematan dalam operasional bank.
- c. Mengkaji dan membantu perbaikan system pengendalian intern terhadap sistem dan prosedur yang berlaku.
- d. Menciptakan dan mengembangkan sistem pemeriksaan intern.

3. Kepala Biro Kredit

Kepala Biro Kredit mempunyai fungsi pokok yaitu:

- a. Mengelola system dan prosedur perkreditan.
- b. Mengkoordinir penyusunan kebijakan dan prosedur perkreditan Bank Kalbar dan menuangkan dalam Buku Pedoman Perkreditan.
- c. Menetapkan, memantau dan memelihara kebijakan exposure untuk golongan resiko dan menetapkan garis besar pedoman alokasi kredit.
- d. Mengkoordinir, mengendalikan dan memantau realisasi pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.

4. Kepala Biro Penyelamatan Kredit

Kepala Biro Penyelamatan Kredit mempunyai fungsi pokok:

- a. Menyelamatkan kredit bermasalah.
- b. Melaksanakan proses penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.
- c. Membantu cabang-cabang dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.

5. Kepala Biro Dana

Kepala Biro Dana mempunyai fungsi pokok yaitu:

- a. Menempatkan dana Bank Kalbar pada pasar uang atau bank lain.
- b. Mengelola nasabah dana.
- c. Menetapkan strategi penghimpunan dana dan treasury bagi Bank Kalbar.
- d. Memantau perkembangan produk Bank Kalbar.

6. Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan

Kepala Biro dan Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi pokok yaitu:

- a. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja (*Business Plan*) dan anggaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang
- b. Menyusun dan menyajikan laporan realisasi rencana kerja (*Business Plan*).

- c. Menciptakan produk-produk baru yang kompetitif.
- d. Mengembangkan sistem dan prosedur tata kerja dan operasional bank.
- e. Melakukan penelitian ekonomi dalam rangka mengembangkan bisnis Bank Kalbar.
- f. Menyelia pelaksanaan manajemen kantor cabang.
- g. Memantau perkembangan usaha cabang.

7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Kepala Biro Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi pokok :

- a. Menyusun, memberikan petunjuk pelaksanaan dan memantau keseluruhan program perencanaan kebutuhan pegawai, penerimaan pegawai, manajemen kesejahteraan dan perencanaan pengembangan tenaga pimpinan.
- b. Menyusun, mengatur dan memantau seluruh kebijaksanaan dan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai termasuk pensiun dan THT.
- c. Menyusun, merencanakan dan mengatur pelaksanaan pelatihan / pendidikan pegawai serta pengembangan karir.

8. Kepala Biro Kesekretariatan dan Umum

Kepala Biro Kesekretariatan dan Umum mempunyai fungsi pokok :

- a. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan hubungan masyarakat.

- b. Mengamankan, mengelola dan memanfaatkan secara optimal kekayaan fisik Kalbar.
- c. Mengelola pengadaan gedung, tanah, perabotan, kendaraan, pelayanan jasa telekomunikasi, pelelangan, persuratan, kearsipan dan jasa logistik lainnya.

E. Jaringan Kantor

Wilayah usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan meliputi seluruh wilayah propinsi Kalimantan Barat, mulai dari ibukota propinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai ke pelosok-pelosok desa dengan membuka jaringan kantor yang meliputi 1 (satu) Kantor Pusat, 1 (satu) Kantor Cabang Utama, 14 (tiga belas) Kantor Cabang, 18 (empat belas) Kantor Cabang Pembantu, 6 (enam) Kantor Kas dan 7 (tujuh) unit kas mobil.

Lokasi jaringan kantor Bank Kalbar dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kantor Pusat, Jalan Rahadi Usman No. 10 Pontianak
2. Kantor Cabang Utama, Jalan Rahadi Usman No. 10 Pontianak
3. Kantor Cabang:
 - 1) Cabang Nanga Pinoh, Jalan Garuda No. 68 Nanga Pinoh
 - 2) Cabang Pemangkat, Jalan Muhammad Hambal No. 1 Pemangkat
 - 3) Cabang Ketapang, Jalan Merdeka No. 138 Ketapang
 - 4) Cabang Mempawah, Jalan G.M Taufik No. 1 Mempawah
 - 5) Cabang Sanggau, Jalan Gunung Benteng No. 32 Sanggau

- 6) Cabang Semitau, Jalan Raden Surif No. 42 Semitau
 - 7) Cabang Putussibau, Jalan Merdeka No. 1 Putussibau
 - 8) Cabang Sintang, Jalan Pattimura No. 7 Sintang
 - 9) Cabang Singkawang, Jalan Diponegoro No. 36 Singkawang
 - 10) Cabang Sambas, Jalan Keramat No. 179 Sambas
 - 11) Cabang Balai Karang, Jalan Raya Entikong No.1 Balai Karang
 - 12) Cabang Ngabang, Jalan Veteran No. 3 Ngabang
 - 13) Cabang Bengkayang, Jalan Jeranding A.R No. 153-154 Bengkayang
 - 14) Cabang Sekadau, Jalan Flamboyan No. 8-9 Sekadau
4. Kantor Cabang Pembantu:
- 1) Capem Pasar Flamboyan, Jalan Pahlawan blok D3 Pontianak
 - 2) Capem Pasar Dahlia, Jalan Gunung Sahari No. 32 Pontianak
 - 3) Capem Pasar Kemuning, Jalan Prof. M. Yamin No. 88
 - 4) Capem Siantan, Jalan Gusti Situt Mahmud No. 148 Pontianak
 - 5) Capem Rasau Jaya, Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kabupaten Pontianak
 - 6) Capem Sungai Pinyuh, Jalan Raya Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak
 - 7) Capem Selakau, Jalan Raya Selakau No. 84 Kabupaten Sambas
 - 8) Capem Tebas, Jalan Raya Tebas Kabupaten Sambas
 - 9) Capem Sekura, Jalan Dwikora Sekura Kabupaten Sambas
 - 10) Capem Sentebang, Jalan H. Yasin No. 224 Kabupaten Sambas
 - 11) Sanggau Ledo, Jalan Sujadi No. 9 Kabupaten Bengkayang
 - 12) Capem Sandai, Jalan Indralaya Sandai Kabupaten Ketapang

- 13) Capem Kapuas Kanan Hulu, Jalan Kolonel Soegiono No. 21 Kab. Sintang
 - 14) Capem Jongkong, Jalan Jembatan Lama Kabupaten Kapuas Hulu
 - 15) Capem Badau, Jalan Lintas Utara Kabupaten Kapuas Hulu
 - 16) Capem Tayan, Jalan Dwikora No. 58 Kabupaten Sanggau
 - 17) Capem Meliau, Jalan Joko Sudarmo Kabupaten Sanggau
 - 18) Capem Kendawangan, Jalan Pangeran Adi No. 215 Kabupaten Ketapang
5. Kantor Kas:
- 1) Bandara Supadio Pontianak
 - 2) RSUD Sudarso Pontianak, Jalan Adi Sucipto
 - 3) Kas Terapung, Semitau Kabupaten Kapuas Hulu
 - 4) Kas Segedong, Jalan Pasar Segedong No. 56 Kabupaten Pontianak
 - 5) Kas Sungai Duri, Jalan Wiraguna No. 3 Kabupaten Pontianak
 - 6) Kas Kembayan, Jalan Raya Kembayan No. 57 Kabupaten Sanggau
6. Payment Point Samsat (di setiap Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat)

F. Aspek Usaha

Usaha pokok Bank Kalbar adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta jasa-jasa keuangan lainnya.

Produk yang disediakan untuk menghimpun dana adalah sebagai berikut:

1. Giro.
2. Tabungan, yang terdiri dari:
 - a. Tabungan Serba Guna (Taserna).

- b. Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda).
3. Deposito, yang terdiri dari:
- a. Deposito Berjangka.
 - b. Sertifikat Deposito.
 - c. Deposit on call.
4. Produk kredit terdiri dari:
- a. Kredit Usaha Kecil (KUK):
 - a) PER (Pemberdayaan Ekonomi Rakyat).
 - b) PEGEL (Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah).
 - c) PHBK (Pembiayaan Hubungan Bank dan Kelompok Usaha).
 - d) Mitra Usaha PT. Pupuk Kaltim.
 - e) Kredit Pembelian Gabah.
 - f) KU/ KMK s.d. Rp 350.000.000,00.
 - b. Kredit Cicilan.
 - c. Kredit Non KUK:
 - a) Kredit Investasi di atas Rp 350.000.000,00.
 - b) Kredit Modal Kerja di atas Rp 350.000.000,00.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi Bank Kalbar melalui skim kredit di atas telah berhasil menyalurkan kredit kepada 38.400 nasabah debitur dengan total kredit yang disalurkan Rp 997.000.000.000,00.

5. Produk jasa-jasa keuangan lainnya:

- a. Pemegang Rekening Kas Daerah.
- b. Kiriman Uang.
- c. Surat Keterangan Bank (referensi bank).
- d. Surat Dukungan Keuangan Bank.
- e. Bank Garansi (tender, pelaksanaan, uang muka, pemeliharaan).
- f. Inkasso.
- g. Jual beli valuta asing (*money changer*).
- h. SKBDN (Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri).
- i. Payment Point (pembayaran rekening telepon, handphone, dan PDAM).
- j. Pembayaran gaji PNS dan pensiunan.
- k. Penyewaan *safe deposit box*.

G. Aspek Personalia

Pesatnya pembangunan dan persaingan antar bank yang semakin ketat menuntut bank Kalbar untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan professional untuk menciptakan karyawan yang memiliki loyalitas, disiplin, terampil dan bertanggung jawab. Sampai dengan tahun 2006, jumlah keseluruhan karyawan adalah 683 orang. Jumlah karyawan tersebut terdiri dari berbagai tingkatan pendidikan dan disiplin ilmu.